

Neraca
Laporan keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Kewajiban

MEMBACA RASIO-RASIO KABUPATEN PEKALONGAN DALAM NERACA

Vivi Devi Rahmawati
Fakultas Ekonomi, Universitas Pekalongan
Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan
Ery Wibowo
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kasipah no.12 Semarang

Abstraksi

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan PP 24/2005. Laporan ini sangat penting artinya sebagai dasar untuk melihat potensi dan pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian ini menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui rasio keuangannya ditinjau dari sisi neraca.

Berdasarkan analisis beserta yang telah dilakukan maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu: berdasarkan analisis rasio menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Pekalongan memiliki kecukupan keuangan untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintah dan memiliki kesempatan untuk menarik investor dan kreditur untuk menyalurkan dananya bagi pengembangan pemerintah Pekalongan

Kata Kunci : rasio-rasio, neraca, keuangan daerah, kabupaten Pekalongan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan bergulirnya otonomi daerah laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh kepala daerah adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran, laporan arus kas, neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan (Bastari, 2004). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan (Hartina, 2009).

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan PP 24/2005. Laporan ini sangat penting artinya bagi manajemen pemerintah daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Seperti halnya dalam dunia usaha banyak pihak yang sangat berkepentingan terhadap Neraca daerah, bukan hanya pihak eksekutif daerah saja tetapi juga legislatif, masyarakat dan pengguna lainnya untuk mengetahui kualitas aset yang dimiliki oleh daerah dan bagaimana pengelolaannya apakah telah dilakukan secara efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Pekalongan dilihat dari sisi neraca: analisis modal kerja dan analisis rasio.

Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris mengenai kinerja keuangan dari sisi Neraca pemerintah daerah kabupaten Pekalongan.

Manfaat

Sebagai dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan ke depan baik oleh eksekutif (*top, middle*, maupun *lower management*), legislatif, maupun *stakeholder* (masyarakat luas) atas kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program/kebijakan terutama yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi semua komponen aset pemerintah daerah kabupaten Pekalongan. Penelitian ini juga dibatasi hanya meneliti kinerja keuangan (dengan analisis Pertumbuhan, analisis proporsi, analisis modal kerja dan analisis rasio) yang berhubungan dengan neraca tahun 2008 dan 2010

Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

TINJAUAN TEORI

Keuangan Daerah

Menurut PP No. 58 tahun 2005, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setiap penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan dengan memberikan informasi yang relevan dengan hasil program kerja yang dikerjakan kepada DPRD dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Neraca yang telah diselenggarakan dan disusun. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur

kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis Aset

a) Analisis Modal Kerja

Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Analisis modal kerja pemerintah daerah dirumuskan:

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

Analisis Rasio

Analisis rasio merupakan analisis dengan cara membandingkan kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat anggaran kas, namun perlu ditunjang oleh analisis likuiditas. Analisis rasio likuiditas terdiri dari:

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \text{Aset Lancar} : \text{Utang Lancar}$$

2) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = (\text{Kas} + \text{Efek}) : \text{Utang Lancar}$$

3) Rasio Cepat (*Quick Test*)

Rasio cepat merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = (\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}) : \text{Utang Lancar}$$

4) Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset

Working Capital to Total Assets adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Working Capital to Total Assets} = (\text{Aset Lancar} - \text{Utang Lancar}) : \text{Total Aset}$$

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \text{Total Aset} : \text{Total Utang}$$

c. Rasio Utang (*Leverage Ratio*)

Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio utang terdiri dari:

1) Rasio Utang terhadap Modal (*Total Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}}$$

2. Rasio Utang terhadap Aset Modal (*Total Debt to Total Capital Assets*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal diprosikan dengan aset tetap. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang terhadap Aset Modal} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset Modal}}$$

Analisa Kewajiban

a) Analisis Rasio Utang terhadap Ekuitas

Analisis ini sudah dibahas pada analisis aset, bermanfaat untuk memberikan indikasi berapa bagian dari ekuitas dana yang diperlukan untuk mendanai utang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}}$$

b) Analisis Rasio Utang terhadap Aset Modal

Analisis ini sudah dibahas pada analisis aset, digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi utangnya dengan aset modal yang dimilikinya apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran utang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang terhadap Aset Modal} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset Modal}}$$

Penelitian Terdahulu:

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang serupa diantaranya adalah penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh Widodo pada Tahun 2001 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwasentralisasi terhadap pusat masih sangat kuat. Rasio efektivitas 104-107% dan rasio efisiensinya berkisar 55%-63%. Hal itu menggambarkan kinerja yang baik. Sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil. Hasil penelitian dini juga tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadeak dengan judul Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian tersebut dianalisis dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah dan disimpulkan bahwa Kemandirian daerah masih sangat jauh dari yang diharapkan, Pemungutan PAD di Kabupaten Maluku Tenggara cenderung tidak efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai kurang dari 100%, kinerja pemerintah daerah yang semakin baik.

Namun penelitian yang dilakukan Tri Suprpto memberikan hasil penelitian yang berbeda dimana dari penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004 disimpulkan Pendapatan Asli Daerah cenderung efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari 100%. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengelola keuangan daerahnya semakin baik.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Obyek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian ini menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui rasio keuangannya ditinjau dari sisi neraca. Objek penelitian yaitu Neraca Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2008 s.d tahun 2010.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder (Indriantoro & Supomo, 2002;146) merupakan data penelitian yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data sekundernya berupa Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, gambaran umum Kabupaten Pekalongan, buku, *data on-line*, situs web serta karya-karya ilmiah terdahulu yang dapat dijadikan sumber penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode Observasi menurut Cooper & Shindler (2001;371): meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun non perilaku. Penelitian ini menggunakan *nonbehavioral analysis*, yaitu analisis catatan. Analisis catatan bisa berupa catatan keuangan, akuntansi, data ekonomi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Analisis ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang objek yang diteliti sehingga tidak melakukan pengujian hipotesa. Caranya adalah dengan mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan tentang makna data yang ada dengan alasannya sehingga memberi gambaran yang jelas.

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Geografis

Kota Pekalongan berada pada jalur jalan regional utara Pulau Jawa antara Jakarta – Semarang dan mempunyai luas wilayah keseluruhan 44,86 Km atau 4,486 ha. Jarak terjauh dari utara ke selatan 9 Km dan dari barat ke timur 7 Km. Secara geografis Kota Pekalongan terletak antara 109°37'55" Bujur Timur dan 6°50'44"-6°55'44" Lintang Selatan.

Jaringan Transportasi Regional

Kota Pekalongan terletak pada jalur utama antara Jakarta dan Semarang, sehingga Kota Pekalongan merupakan kota transit dalam jaringan transportasi utama Pulau Jawa. Hal ini berpengaruh dalam perkembangan Kota Pekalongan dimasa yang akan datang khususnya dalam pengembangan jaringan lalu lintas kota, mengingat jalur jalan tersebut membelah kota Pekalongan.

Potensi Daerah

Kota Pekalongan yang dikenal dengan sebagai "Kota Batik" mempunyai potensi besar dalam kerajinan pembatikan dan telah berkembang begitu pesat, baik dalam skala kecil maupun besar, bahkan telah menuju ekspor. Batik Pekalongan yang bercorak warna-warni dan khas serta merangsang menjadikan hasil batik Pekalongan semakin dikenal dimana-mana keseluruh nusantara bahkan dunia.

Perekonomian

PDRB per kapita Kota Pekalongan menurut harga konstan pada tahun 2008 mencapai Rp. 12.003.660,00 dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp. 11.041.384,00 sehingga secara riil pada tahun 2008 PDRB Kota Pekalongan naik sekitar 8,72%. Secara sektoral pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

ANALISIS DATA

Analisis Neraca Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2008 dan 2009

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan daerah yang menyajikan informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca.

Data keuangan yang ada akan dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio berikut:

1) Rasio Modal Kerja

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa dari tahun 2008 s/d tahun 2010 menunjukkan angka positif yaitu sebesar 78.604.171.217,80, 64.390.943.954,10 dan 57.521.573.282,00. Angka positif tersebut berarti sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan nilai tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dapat menghadapi krisis keuangan.

2) Rasio Lancar (Current Ratio)

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah kabupaten Pekalongan tahun 2008 sebesar 78,29, Tahun 2009 sebesar 51,22 dan Tahun 2010 sebesar 9,98. Nilai ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten Pekalongan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan asset lancarnya namun di sisi lain terjadi penurunan nilai rasio lancar dari tahun ke tahun memberi pertanda yang kurang baik yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Pekalongan.

3) Rasio Kas

Hasil perhitungan rasio kas pada pemerintah kabupaten Pekalongan pada Tahun 2008 sebesar 63,33. Tahun 2009 sebesar 37,23 dan Tahun 2010 sebesar 6,19. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pemerintah kabupaten Pekalongan memiliki masih mampu memenuhi utang yang harus segera dipenuhi dengan kas

dan efek. Nilai tersebut sudah baik tetapi pemerintah Pekalongan harus tetap memantau adanya penurunan rasio kas.

4) **Rasio Cepat (*Quick Ratio*)**

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rasio cepat pemerintah kabupaten Pekalongan pada Tahun 2008 sebesar 66,07, Tahun 2009 sebesar 41,43 dan Tahun 2010 sebesar 8,07. Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan nilai yang baik namun terjadi penurunan kualitas. Hal ini berarti pemerintah Pekalongan memiliki aset yang cukup untuk membayar utang namun perlu mewaspadai turunnya kemampuan aset di dalam menutup utang.

5) **Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset (*Working Capital to Total Assets*)**

Hasil perhitungan rasio modal kerja terhadap total aset di atas menunjukkan 0,02 pada Tahun 2008, 0,04 di Tahun 2009 dan 0,03 di Tahun 2010. Hal ini menunjukkan modal kerja pemerintah kabupaten Pekalongan cukup baik karena semakin tinggi nilai rasio modal kerja makin kecil jumlah pinjaman yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

6) **Rasio Solvabilitas**

Hasil perhitungan rasio solvabilitas pada pemerintah kabupaten Pekalongan Tahun 2008 sebesar 1332,32, Tahun 2009 sebesar 658,38 dan Tahun 2010 sebesar 248,31. Dari nilai-nilai rasio solvabilitas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Pekalongan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang-utangnya baik utang jangka pendek maupun jangka panjang meskipun penurunannya harus diwaspadai.

7) **Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)**

Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa tahun 2008 rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0.0008, Tahun 2009 sebesar 0,0015 dan Tahun 2010 sebesar 0,0040. Jumlah yang sama dengan rasio utang terhadap aset modal tersebut menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Pekalongan untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

8) **Rasio Utang terhadap Aset Modal (*Total Debt to Capital Assets Ratio*)**

Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa tahun 2008 rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0.0008, Tahun 2009 sebesar 0,0015 dan Tahun 2010 sebesar 0,0040. Jumlah tersebut menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Pekalongan untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis beserta yang telah dilakukan maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu: berdasarkan analisis modal kerja, rasio validitas, solvabilitas dan rasio utang menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Pekalongan memiliki kecukupan keuangan untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintah, mampu memenuhi segala utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pemerintah kabupaten Pekalongan memiliki kesempatan untuk menarik investor dan kreditur untuk menyalurkan dananya bagi pengembangan pemerintah Pekalongan

Saran

- 1) Pemerintah kabupaten Pekalongan memiliki prestasi yang cukup baik dalam hal pengelolaan asset. Mengingat aktivitas operasional Pekalongan sudah ditunjang dengan dana operasional yang lancar (rasio modal kerja) dan mencukupi maka sudah seharusnya pemkot Pekalongan mengalokasikan sumberdaya yang ada, untuk tidak berkuat pada masalah operasional rutin saja tetapi mulai melakukan perencanaan pengembangan ekonomi strategis yang berdemensi kerakyatan. Misalnya dengan mengubah pola birokrasi ke pola entrepreneurship.
- 2) Menurut hasil analisis terhadap utang dimana pemerintah kabupaten Pekalongan memiliki rasio utang terhadap aset dan utang terhadap ekuitas yang rendah. Rasio tersebut mencerminkan kabupaten Pekalongan masih memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Kemampuan untuk dapat melunasi utang ini dapat dimanfaatkan untuk mengundang investor luar untuk melakukan investasi yang selaras dengan potensi pekalongan yang memiliki *multiple player effect*. Investasi tersebut diharapkan mampu mendongkrak ekspor khususnya dalam komoditas batik.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2005, *Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, Website Depdagri, Jakarta.
- , 2009, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Website Depdagri, Jakarta.
- , 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Website Depdagri, Jakarta.
- , 2005, *Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Website Depdagri, Jakarta.
- , 2007, *Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, Website Depdagri, Jakarta.
- , 2008, *Undang-undang nomor 12 tentang Pemerintah daerah*
- , 2009, *Kota Pekalongan Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan dan Bappeda Kota Pekalongan, Pekalongan.
- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Askam Tuasikal, 2009, *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman, Sistem Akuntansi Keuangandan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Provinsi dan Kota/Kabupaten di Maluku*
- Beny Setyo Nugroho, *Analisis Kinerja Keuangan pada Pemeritnah Daerah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar dalam Melaksanakan otonomi Daerah*, Skripsi Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Cooper & Schindler. 2001. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Gudang makalah.blogspot.com/2009/judul_tesis_program_pascasarjana.html, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan permendagri No.13Tahun 2006 Pada Pemerintahan X*
- Indriantoro & Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE, Yogyakarta.

- James, Van Horne, 1986, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Machfud Sidik, 2002, Format Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional, Seminar Nasional “Public Sector Scorecard”, Jakarta
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, www.ekonomirakyat.org
- Sunarto dan Soedarsono, 2007, Sistem Administrasi Keuangan Daerah I, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPK dan Pembangunan, Diklat Pembentukan Auditor Terampil. Bogor
- Uma Sekaran, 2003, *Research Methods For Business*, Salemba Empat, Jakarta.